

## Kesetaraan Gender dan Politik: Studi Kasus Terpilihnya Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia

Aniqotul Ummah <sup>1\*</sup>, Canza Anadya Sabrina Putri Kristyafajar <sup>2</sup>, Nirina Jelita Dewi <sup>3</sup>, Raihana Devi Sarasvati<sup>4</sup>

<sup>1 2 3 4</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

\* Corresponding Author: reyhanadev@gmail.com

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
16 Juni 2023	29 Juni 2023	19 Juli 2023	21 Juli 2023

### Abstract

This article explores the issue of gender equality in politics, with a focus on the case study of Julia Gillard's election as Australia's first Prime Minister in a particular year (election year). Julia Gillard plays an important role as the first woman to hold the highest office in Australia's government. Her election marked a milestone in efforts to increase women's participation in politics in the country. This research aims to analyze the factors that influenced Julia Gillard's election as Prime Minister, including the challenges she faced and strategies she used to achieve this position. Qualitative research methods were used to collect data through document analysis, interviews with relevant stakeholders, and literature review. The results showed that Julia Gillard's election was inseparable from her struggle and hard work when facing various political challenges. She overcame the stereotypical perceptions of women in politics and proved her competence in leading the country. In addition, support from her political party, fellow politicians, and the public also played an important role in achieving her election. In addition, this article reviews the impact of Julia Gillard's election as Prime Minister of Australia in promoting gender equality and change in politics. Her leadership and policies during her tenure were also explained to understand the role of her contribution in realizing gender equality at the government level. By analyzing the case study of Julia Gillard, this journal seeks to provide insight into the importance of women's representation in politics and how the influence of her election can affect overall gender equality. This case study can provide guidance for other countries in their efforts to increase women's participation and representation in governmental institutions.

**Keywords:** Australia, Discrimination, Gender Equality, Julia Gillard, Women's Representation.

How to cite: Ummah, A. ., Kristyafajar , C. A. S. P. ., Dewi, N. J. ., & Sarasvati, R. D. . (2023). Kesetaraan Gender dan Politik: Studi Kasus Terpilihnya Julia Gillard dalam Lembaga Pemerintah Australia . *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 32(2). <https://doi.org/10.30762/empirisma.v32i2.1225>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

## PENDAHULUAN

Permasalahan gender menjadi salah satu masalah utama yang masih sering terjadi di masyarakat, diantaranya diskriminasi dalam politik.<sup>1</sup> Secara etimologi, gender adalah ciri khas atau peran yang dibentuk masyarakat melalui budaya dan sosial yang pada dasarnya melekat pada suatu jenis kelamin. Gender adalah hal yang digunakan untuk menunjukkan peran, sifat, dan karakteristik pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan psikologis masyarakat sekitar.<sup>2</sup> Gender lebih menentukan peran dengan bentuk maskulinitas ataupun feminitas, bukan jenis kelamin dan biologis.<sup>3</sup>

Gender memiliki peran yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hal tersebut karena gender dapat menentukan seseorang untuk bertindak atau membuat keputusan sesuai dengan nilai dan norma yang ada di suatu lingkungan sosial. Selain itu, partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan suatu hal yang penting terutama dalam lembaga legislatif. Hal tersebut dikarenakan lembaga legislatif merupakan wadah representasi rakyat.<sup>4</sup> Maka dari itu, diperlukannya kesetaraan gender dalam politik agar seimbangnnya peran serta partisipasi perempuan.<sup>5</sup> Di Australia, kesetaraan gender dalam politik pun menjadi sebuah isu. Berdasarkan data World Economic Forum 2020, Australia menempati nomor urut ke-44 mengenai ekonomi, pendidikan, kesehatan dan partisipasi politiknya. Sedangkan representasi perempuan dalam politiknya menempati nomor urut ke-41.<sup>6</sup>

Isu gender pada pemerintahan Australia menjadi permasalahan yang semakin kompleks, di mana laki-laki lebih mendominasi dalam bersuara di dunia politik dan pemerintahan. Australia yang condong mendukung adanya anggota parlemen laki-laki

---

<sup>1</sup> Mubaidi Sulaeman, "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018): 104–30.

<sup>2</sup> Muhammad Yaufi and Muhammad Yaufi, "Reinterpretation Meaning of Qiwama in Surah An-Nisa'verse 34 Perspective Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl," *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1, no. 01 (December 5, 2022): 193–209.

<sup>3</sup> Hudan Mudaris, "Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 234–48.

<sup>4</sup> Kunthi Tridewiyanti, "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik 'Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif,'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.

<sup>5</sup> Wahidul Anam and Mubaidi Sulaeman, "Reinterpretasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022), <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.

<sup>6</sup> Julia Gillard and Ngozi Okonjo-Iweala, *Women and Leadership: Real Lives, Real Lessons* (MIT Press, 2022).

yang dinilai lebih mampu menyampaikan aspirasi dan lebih agresif.<sup>7</sup> Aktivistis feminisme yang mulai bermunculan dan menentang isu gender pada perpolitikan Australia ini. Para pemerintahan perempuan juga menilai bahwa hal ini sangat menyinggung gender. Mereka mengatakan bahwa perlakuan perempuan pada dunia politik terlalu mengintimidasi dan sangat menggolongkan perempuan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya seorang politikus perempuan yang keluar dari suatu Partai Liberal dikarenakan melakukan perlawanan terhadap isu gender di dalam pemerintahan.<sup>8</sup>

Dalam konteks ini, penelitian mengenai keterwakilan perempuan dalam parlemen Australia menjadi relevan dan signifikan. Melalui penelitian ini, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan di parlemen.<sup>9</sup> Studi mengenai keterwakilan perempuan dalam politik juga dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika politik di Australia, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, seperti kuota dan *affirmative action*. Penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mempercepat kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dalam parlemen Australia. Dalam konteks ini, studi kasus tentang terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia menjadi sangat relevan. Julia Gillard berhasil menembus hambatan-hambatan gender yang ada dan mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang memegang jabatan tertinggi dalam lembaga pemerintahan Australia. Keterpilihannya menggarisbawahi pentingnya kualitas kepemimpinan perempuan dan memberikan contoh inspiratif bagi generasi perempuan di Australia dan di seluruh dunia.<sup>10</sup>

Hal ini terlihat pada masa kepemimpinan Julia Gillard pada tahun 2012, ketika ia berpidato berjudul “Sexism and misogyny”, di mana ia menyerang Pemimpin Partai

---

<sup>7</sup> Ian McAllister, “The Gender Gap in Political Knowledge Revisited: Australia’s Julia Gillard as a Natural Experiment,” *European Journal of Politics and Gender* 2, no. 2 (June 1, 2019): 197–220, <https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831148>.

<sup>8</sup> Carol Johnson, “Playing the Gender Card: The Uses and Abuses of Gender in Australian Politics,” *Politics & Gender* 11, no. 2 (June 2015): 291–319, <https://doi.org/10.1017/S1743923X15000045>.

<sup>9</sup> Jennifer Curtin, “The Prime Ministership of Julia Gillard,” *Australian Journal of Political Science* 50, no. 1 (January 2, 2015): 190–204, <https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1010481>.

<sup>10</sup> Linda Trimble, “Julia Gillard and the Gender Wars,” *Politics & Gender* 12, no. 2 (June 2016): 296–316, <https://doi.org/10.1017/S1743923X16000155>.

Liberal saat itu, Tony Abbott, dan mengatakan bahwa Tony Abbott adalah seseorang yang seksis. dan juga misogynis.<sup>11</sup> Dengan peristiwa itu, pidatonya mendapat momentum dan diakui oleh dunia internasional karena mengungkap sisi patriarki politik Australia. Melalui terpilihnya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri perempuan pertama Australia tentu hal ini memberikan peluang pada kaum perempuan untuk mampu berperan secara aktif dan memperoleh kedudukan yang setara bersama kaum laki-laki.<sup>12</sup> Oleh karena itu, melalui makalah ini penulis ingin melihat lebih lanjut mengenai bagaimana keterlibatan perempuan Australia Dalam Parlemen Pada Kepemimpinan Julia Gillard sebagai Perdana Menteri.

Penelitian tentang kasus Julia Gillard ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi keterpilihannya dan bagaimana kepemimpinannya membentuk perubahan dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam politik. Melalui analisis yang komprehensif tentang peran dan pengaruhnya sebagai Perdana Menteri, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi strategi yang berhasil digunakan untuk mencapai keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam lembaga pemerintahan. Dengan menggali lebih dalam tentang studi kasus Julia Gillard, artikel ilmiah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada literatur akademis tentang kesetaraan gender dan politik, serta memberikan informasi yang berharga bagi pembuat kebijakan dan praktisi politik dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merata bagi perempuan di dunia politik.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik atau yang juga dikenal sebagai *explanatory research*.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan

---

<sup>11</sup> Anna Worth, Martha Augoustinos, and Brianne Hastie, "Playing the Gender Card': Media Representations of Julia Gillard's Sexism and Misogyny Speech," *Feminism & Psychology* 26, no. 1 (February 1, 2016): 52–72, <https://doi.org/10.1177/0959353515605544>.

<sup>12</sup> Ngaire Donaghue, "Who Gets Played By 'The Gender Card'?", *Australian Feminist Studies* 30, no. 84 (April 3, 2015): 161–78, <https://doi.org/10.1080/08164649.2015.1038118>.

<sup>13</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.

dalam penelitian ini adalah pendekatan representasi, gender, dan feminisme liberal.<sup>14</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada secara analisis dan deskriptif terkait partisipasi perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) di Australia, khususnya mengenai hambatan yang dihadapi oleh perempuan yang bersaing dalam pemilu. Deskriptif-analitik adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena atau masalah secara detail.<sup>15</sup> Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif-analitik akan digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang partisipasi perempuan dalam pemilu di Australia, serta untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan yang terlibat dalam proses pemilu.

Pendekatan representasi akan memfokuskan pada cara perempuan diwakili atau dihadirkan dalam arena politik, termasuk dalam pemilu dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini akan melihat sejauh mana perempuan memiliki akses dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik, dan bagaimana citra atau representasi perempuan dalam politik mempengaruhi partisipasi mereka. Pendekatan gender akan mengeksplorasi bagaimana faktor gender mempengaruhi partisipasi politik perempuan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan gender akan membahas bagaimana stereotip gender, norma sosial, dan peran tradisional dapat mempengaruhi partisipasi politik perempuan dalam pemilu di Australia.<sup>16</sup>

Pendekatan feminisme liberal akan menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan peran negara dalam menciptakan kesempatan yang adil bagi perempuan dalam politik.<sup>17</sup> Pendekatan ini akan mengevaluasi sejauh mana negara dan kebijakan publik telah memfasilitasi atau menghambat partisipasi perempuan dalam pemilu. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan representasi, gender, dan feminisme liberal, penelitian ini akan memberikan analisis yang mendalam tentang hambatan-hambatan

---

<sup>14</sup> Patricia M. Lengermann and Jill Niebrugge, "Intersubjectivity and Domination: A Feminist Investigation of the Sociology of Alfred Schutz," *Sociological Theory*, 1995, 25–36.

<sup>15</sup> Penny Farrelly, "Choosing the Right Method for a Qualitative Study," *British Journal of School Nursing* 8, no. 2 (March 2013): 93–95, <https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.93>.

<sup>16</sup> McAllister, "The Gender Gap in Political Knowledge Revisited."

<sup>17</sup> Anne Sofie Roald, "Feminist Reinterpretation of Islamic Sources: Muslim Feminist Theology in the Light of the Christian Tradition of Feminist Thought," in *Women and Islamization* (Routledge, 1998).

yang dihadapi oleh perempuan yang bersaing dalam pemilu di Australia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah kesetaraan gender dalam politik dan memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan merata untuk partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik.

## **PEMBAHASAN**

### ***Peran Keterwakilan Perempuan di Parlemen Era Julia Gillard***

Australia merupakan salah satu negara yang menganut paham demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Walaupun demikian, nyatanya pemerintahan Australia tetap didominasi oleh kaum laki-laki. Terpilihnya Julia Gillard merupakan sebuah wujud formal representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan Australia.<sup>18</sup> Dengan kehadiran Gillard ke tahta tertinggi pemerintahan Australia menjadi sebuah momentum kaum perempuan di lembaga politik Australia.<sup>19</sup> Pada saat Jullia Gillard memimpin parlemen keterwakilan peran perempuan sudah cukup baik. Terjadi peningkatan representasi kaum perempuan terjadi setelah ia mejabat sebagai perdana menteri yang bertujuan memperjuangkan suara perempuan. Terdapat setidaknya 8 perempuan yang mewakili pemerintahan di negara bagian ALP dan 1 orang perempuan yang memimpin ACT liberal pemerintahan. Sehingga setiap negara bagian maupun teritorial di Austalia memiliki wakil perempuan untuk parlemen dan menteri paling tidak satu orang perempuan.<sup>20</sup>

Pada tanggal 24 juni 2010 secara resmi Julia Gillard dilantik sebagai perdana menteri di Australia. Gillard meraup jumlah suara sebanyak 57% sedangkan lawannya pada saat itu Kevin Rudd hanya berhasil meraup 45% suara, dengan begitu ia telah berhasil merebut kekuasaan Rudd. Terpilihnya Jullia Gillard menjadi sejarah bagi Australia karena ia menjadi perempuan pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi

---

<sup>18</sup> Diana Boxer, "Discourse, Politics and Women as Global Leaders," 2015, 1–366.

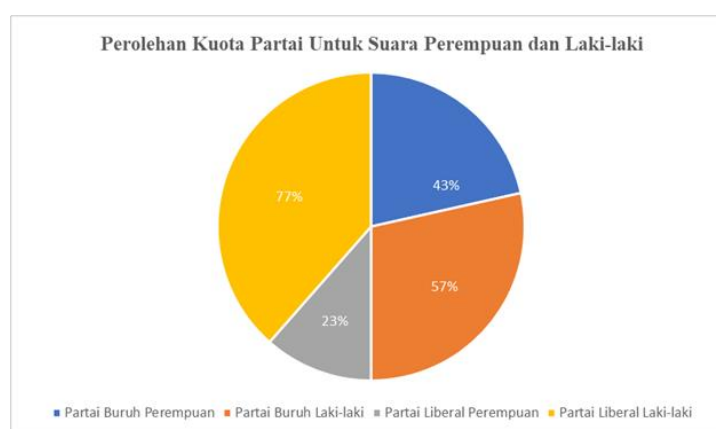
<sup>19</sup> Blair Williams, "It's a Man's World at the Top: Gendered Media Representations of Julia Gillard and Helen Clark," *Feminist Media Studies* 22, no. 4 (May 19, 2022): 780–99, <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1842482>.

<sup>20</sup> Joakim Eidenfalk et al., "Prime Ministers as Leaders: Applying Self-Determination Theory on Australian Prime Ministers," *Journal of Social and Political Psychology* 6, no. 1 (June 26, 2018): 224–41, <https://doi.org/10.5964/jpspp.v6i1.763>.

Perdana Menteri Australia. Pada masa pemerintahannya terdapat kritik yang ditujukan secara langsung kepada Julia Gillard, hal tersebut disebabkan oleh akibat terjadinya kesenjangan gender. Gillard yang berstatus single dianggap tidak kompeten jika harus menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Stereotip masyarakat Australia beranggapan jika wanita telah berkeluarga memiliki kemampuan yang jauh lebih kompeten untuk secara efektif mendapatkan kedudukan di bidang politik.<sup>21</sup>

Sebelum hadirnya Gillard sebagai Perdana Menteri, aturan mengenai sistem kuota perempuan dalam pemerintahan sangat menyulitkan dan dibatasi. Gillard yang memiliki tujuan untuk menyamaratakan strata social dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah ia menjabat terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait kuota perempuan dalam parlemen. Pada tahun 2019, partai buruh mendapatkan kuota suara yang cukup besar untuk perempuan besar yakni sebanyak 47% dan untuk laki-laki sebesar 53%. Partai liberal meraup 23% suara untuk perempuan dan 77% untuk laki-laki.<sup>22</sup>

### Grafik 1.1 Perolehan Kuota Partai Untuk Suara Perempuan dan Laki-laki



Sumber : Federal Election 2019: All the winners and losers (9News)

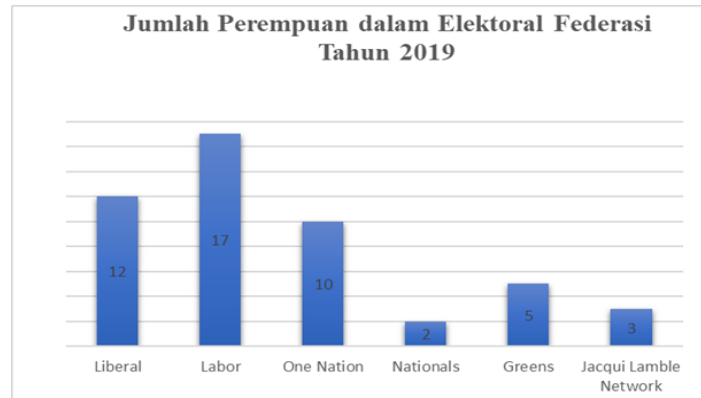
Hal ini menjadi sebuah titik balik sebuah keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Elektabilitas perempuan dalam parlemen mulai menunjukkan perempuan juga memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki sebagai pemimpin.

<sup>21</sup> Wright, G.. A Smart, Modern, Fair Australia. In N. Platform, Organisational Polices, hlm, 230-239. Sydney: Barton ACT. (2018).

<sup>22</sup> Sukmawaty Arisa Gustina, *Hak Politik Perempuan Di Parlemen: Perspektif Hukum Yang Berkeadilan* (Feniks Muda Sejahtera, 2022).

Partai Buruh menjadi bukti bahwa keterwakilan politik perempuan di Australia mulai menunjukkan kemajuan yang pesat.<sup>23</sup>

**Grafik 1.2 Jumlah Perempuan dalam Elektoral Federasi Tahun 2019**



Sumber : New and continuing women in Parliament(ABC News)

Tatanan sosial tradisional dianggap terancam akibat dari semakin massifnya keterwakilan perempuan dalam bidang pemerintahan, di mana saat ini perempuan dapat mengakses hak memilih sebagaimana mestinya.<sup>24</sup> Hal tersebut terjadi akibat adanya kekhawatiran bahwa perempuan tidak menjalankan kewajibannya. Apabila perempuan lebih fokus serta aktif dalam menjalankan karir baik dibidang politik maupun lainnya menghasilkan paradigma bahwa perempuan akan meninggalkan perannya yang inti seperti mengurus pekerjaan domestik. Gillard memperjuangkan kesetaraan gender bukan untuk sebagai alasan menggantikan peran inti dari seorang perempuan, melainkan untuk kaum perempuan mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara untuk memilih dan dipilih. Sehingga secara perlahan penerapan kesetaraan gender di Australia akan berjalan lebih baik.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Vicko Taniady, Brillian Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi, "Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil," *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (December 29, 2020): 1055–64, <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1139>.

<sup>24</sup> Andie Hevriansyah, "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (June 9, 2021): 67–85.

<sup>25</sup> Hilal Hilmawan, "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia," *ASPIRASI* 9, no. 2 (February 20, 2019): 104–11.



**Tabel: Depotisme Model Terkait Penyetaraan Gender dalam Politik**

Ukuran	Dominasi Laki-laki	Kesetaraan Gender
1. Keterwakilan	Representasi perempuan kurang.	40%-60% tingkat keterwakilan penyetaraan gender.
2. Politik sebagai karir pekerjaan	Dominasi stereotip <i>toxic masculinity</i> .	Ketimpangan gender dan pemahaman terkait keluarga.
3. Difresiansi gender secara vertikal	Ketidaksetaraan gender dalam pembagian mengenai sistem politik.	40%-60% tingkat mendapatkan posisi jabatan sebagai pemimpin.
4. Difresiansi gender secara horizontal	Aksebilitas perempuan dipersulit dan sangat dibatasi dalam sistem dan kuota politik.	Regulasi diimplementasikan tanpa merugikan satu pihak mengenai <i>skills</i> dan minat.
5. Rasionalitas dan kultur	Pemahaman gender mengenai politisi.	Didominasi oleh wacana mengenai penyetaraan gender dan demokrasi.
6. Kebijakan Publik	Laki-laki cenderung lebih diuntungkan daripada perempuan.	Mencanangkan program terkait penyetaraan gender sehingga kebijakan akan memperhatikan proporsi dari kedua gender.

Sumber: Dahlerup dan Leyenaar

Julia Gillard juga dihadapi tantangan yang cukup berat berupa bekerja dengan pemerintah minoritas. Tetapi dengan tekad kuat serta keterampilan benegosiasi yang hebat, masa jabatan Gillard sebagai perdana menteri sangat produktif. Terlepas dari kekacauan politik di sekitarnya, 570 undang-undang disahkan oleh Senat, dengan pencapaian penting termasuk Skema Asuransi Disabilitas Nasional, komisi kerajaan pelecehan anak, harga karbon, dana pendidikan, dan cuti orang tua berbayar. Gillard telah mendapatkan pencapaian dan tantangan, pasang surut, intensitas dan tekanan. Gillard dia juga harus menghadapi masalah lain - terutama kritik dan pelecehan pribadi yang berasal dari jenis kelaminnya.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Gillard and Okonjo-Iweala, *Women and Leadership*.

### ***Upaya Julia Gillard Dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Australia di Parlemen***

Terpilihnya Julia Gillard dari *Australian Labor Party* (ALP) sebagai perdana menteri perempuan pertama di Australia pada tahun 2010 membawa gejolak perubahan yang besar bagi arus politik domestik maupun luar negeri. Hal ini menjadi penanda bahwa fokus utama dari kepemimpinan parlemen tersebut akan mengarah kepada peningkatan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam skala internasional.<sup>27</sup> Pada proses pemilihannya, Gillard mampu menjangkau para pemilih dengan turut menyuarakan kebijakan gender yang ingin menyamaratakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi, seperti kurangnya partisipasi perempuan dalam politik dan kebijakan yang masih mengesampingkan hak perempuan. Tujuan ini tentunya berhasil mengubah pandangan masyarakat terhadap keterwakilan dan eksistensi perempuan dalam politik. Sebelum terpilih menjadi perdana menteri Australia yang ke-27, Gillard memangku jabatan sebagai wakil perdana menteri Australia sekaligus merangkap menteri tenaga kerja, pendidikan, dan, sosial dengan Kevin Rudd sebagai perdana menteri.<sup>28</sup>

Secara historis, Australia bukanlah suatu negara yang dengan gencar menjunjung tinggi hak-hak perempuan dalam politik atau sensitivitas gender, pada faktanya Australia membutuhkan 40 tahun untuk merealisasikan bentuk demokrasi yang memfasilitasi hak suara dan kedudukan perempuan di parlemen yang dipelopori oleh Dorothy Tangney dan Dame Enid Lynos sebagai anggota parlemen nasional pertama kali yang dilantik di Australia sejak tahun 1902.<sup>29</sup> Hal tersebut terjadi karena dominasi kaum laki-laki yang duduk di parlemen sehingga menimbulkan asumsi bahwa parlemen merupakan sebuah institusi yang identik dengan maskulinitas sehingga dengan

---

<sup>27</sup> Kate Allman, "Profile: Exclusive: Phoenix Rising: Julia Gillard on Life after Politics," *LSJ: Law Society Journal*, no. 62 (November 9, 2020): 40–43, <https://doi.org/10.3316/informit.818999323033848>.

<sup>28</sup> Linda Trimble, *Ms. Prime Minister: Gender, Media, and Leadership* (University of Toronto Press, 2018).

<sup>29</sup> "Dibalik Terpilihnya Julia Gillard Sebagai PM Australia: Analisis Gender," *PUSAT RISET POLITIK* (blog), June 28, 2010, <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/dibalik-terpilihnya-julia-gillard-sebagai-pm-australia-analisis-gender/>.

mudahnya mengesampingkan peran perempuan dalam dunia perpolitikan.<sup>30</sup> Tindakan maskulinitas tersebut merupakan sebuah upaya bagi kaum laki-laki untuk menunjukkan kekuasaannya melalui tiap akses dan struktur di pemerintahan agar menyandang status di masyarakat.

Sifat tersebut tentunya bertentangan dengan perwujudan kesetaraan gender itu sendiri sehingga dibutuhkan kesadaran akan pentingnya representasi perempuan selaku upaya untuk membangkitkan kembali demokrasi yang mengutamakan hak laki-laki dan perempuan untuk setara, karena ketika perempuan dan laki-laki berbagi kekuasaan untuk membuat keputusan dan memimpin, manfaatnya akan dirasakan di seluruh komunitas mereka.<sup>31</sup> Alur pemerintahan Julia Gillard sendiri tidak jauh dari pemikiran feminisme liberal yang memiliki pandangan bahwa perempuan merupakan agen rasional yang mampu bertindak dan memiliki kebebasan untuk menentukan keputusannya sendiri.<sup>32</sup> Kaum feminis liberal sendiri mendefinisikan ketidaksetaraan dalam negara dengan melihat bahwa masih banyak perempuan yang hanya menjadi sekedar ‘pelengkap’ atau warga negara biasa yang dipandang tidak memiliki kapabilitas dalam pembuatan kebijakan.

Untuk itu, pemerintahan Julia Gillard dapat dikatakan sebagai momen *enlightenment* bagi perempuan di dunia karena mampu memberantas stereotip perempuan dalam parlemen dengan memegang kendali penuh terhadap pembuatan kebijakan serta politik negara. Hal ini juga didukung oleh pengaruh ALP (*Australian Labor Party*) dalam melihat adanya kesenjangan gender yang ada di dalam parlemen sehingga hak dan peran perempuan harus diperjuangkan mengingat laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam parlemen, sehingga pada 1994 ALP

---

<sup>30</sup> Dian Fiskurniawati, “Representasi Kebijakan Australia Labor Party Dalam Kuota Parlemen Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010-2019),” 2020.

<sup>31</sup> Katharine A.M. Wright and Jack Holland, “Leadership and the Media: Gendered Framings of Julia Gillard’s ‘Sexism and Misogyny’ Speech,” *Australian Journal of Political Science* 49, no. 3 (July 3, 2014): 455–68, <https://doi.org/10.1080/10361146.2014.929089>.

<sup>32</sup> Utari Diyarza Utami, “Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan Di Australia,” *Jurnal PIR: Power in International Relations* 4, no. 2 (2020): 101–14.

memutuskan untuk menerapkan kuota bagi perempuan yang ingin ikut andil dan menjabat dalam pemilihan umum di Australia.<sup>33</sup>

Berdasarkan reformasi politik tersebut, dapat dikatakan bahwa hingga 2019 peningkatan representasi perempuan di parlemen mulai bertambah dan hampir memenuhi angka 50%. Pada masa jabatannya, Julia Gillard selalu membuat perubahan bagi perempuan agar dapat memiliki hak yang sama dengan laki-laki, dimulai dengan menaikkan angka tenaga kerja perempuan sebesar 58% pada tahun 2008 yang awalnya hanya tumbuh di sekitar angka 44% dari tahun 1978, persentase tersebut juga meningkat tanpa mengesampingkan perempuan yang berasal dari pengungsian atau imigran.<sup>34</sup> Kemudian, Julia Gillard dan partai buruh mendirikan sebuah organisasi bernama Emily's List untuk membantu memberdayakan perempuan dari partai buruh untuk dapat berpartisipasi dalam politik agar terpilih dalam pencalonan umum dengan mengumpulkan dukungan dan donasi yang terarah serta akses terhadap pendidikan. Dukungan terhadap pembuatan Emily's List memiliki pengaruh penting untuk meningkatkan kuota dan partisipasi politik perempuan dalam parlemen Australia.<sup>35</sup>

Perubahan yang dilakukan oleh Julia pun akhirnya membuka jalan bagi para perempuan lain untuk ikut terlibat dalam perpolitikan negara. Melihat bahwa Julia mampu membawa perubahan yang berdampak besar bagi partai dan masyarakat, pemilihan umum kembali diadakan di tahun 2010 antara Julia Gillard dan Tony Abbott yang merupakan lawan yang berasal dari pemimpin partai oposisi. Dalam kampanye pemerintahan yang dilakukan oleh kedua calon tersebut, Tony Abbott cenderung lebih memfokuskan tujuannya kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat mengesampingkan hak-hak perempuan dalam peranan sosial yang lalu mengarah kepada sikap yang secara tidak langsung mengatakan bahwa perempuan sebaiknya tidak terjun dalam pekerjaan politik, sehingga hal ini memunculkan kontroversi yang bertolak belakang dengan visi misi dari Julia Gillard yang justru ingin menghadirkan peranan perempuan secara

---

<sup>33</sup> Veronica Ann O'Flaherty, "A Very Dim Light, a Very Steep Hill: Women in the Victorian Branch of the Australian Labor Party" (phd, Victoria University, 2005), <http://vuir.vu.edu.au/>.

<sup>34</sup> Pemerintah Australia, U. N. Women, and Ryan Brown Flickr, "Developmental Leadership," 2022.

<sup>35</sup> Joy McCann and Janet M. Wilson, "Representation of Women in Australian Parliaments 2014," 2012, <https://www.semanticscholar.org/paper/Representation-of-women-in-Australian-parliaments-McCann-Wilson/268669341dfd4172932cd9872932752782812c1e>.

inklusif di parlemen dan meningkatkan partisipasi perempuan di tingkatan internasional.<sup>36</sup>

Namun akhirnya jalannya demokrasi pun berhasil menentukan hasil akhirnya, perolehan suara unggul pada Julia Gillard dari partai ALP (*Newspoll and The Australian*). Kemenangan ini dianggap sebagai momentum kebangkitan dari kesetaraan gender di Australia yang mampu menghadirkan representasi perempuan secara formal di institusi politik dengan lebih serius, hal ini tentunya menimbulkan kesadaran akan meningkatkan kepemimpinan perempuan di tiap negara bagian Australia. Pada tahun 2011 Tasmania mengangkat Lara Giddings sebagai Perdana Menteri ke-44 sekaligus perempuan pertama yang menjabat sebagai PM di Tasmania. Komitmen-komitmen politik yang dilakukan oleh Julia Gillard merupakan sebuah perpanjangan tangan dari konsep feminisme liberal yang membantu melihat bagaimana pengaruh kebijakan pemerintahan Gillard pada politik luar negeri.

Dibawah pemerintahannya, tepat pada 13 September 2011 Australia membentuk sebuah duta internasional untuk perempuan dan anak-anak untuk pertama kalinya yang ditunjuk langsung oleh Julia Gillard dengan Penny Williams sebagai dutanya. Hal ini dilakukan guna memaksimalkan peran Australia di ranah internasional sebagai negara yang memberdayakan dan mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam skala global, diikuti dengan bagaimana hal ini juga dapat meningkatkan *awareness* dalam mempromosikan kesetaraan gender agar perempuan termotivasi untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan di kawasan Asia Pasifik.<sup>37</sup> Kemudian pada November 2011, Australia membentuk program bernama *Australian AID* (AusAID) yang berorientasi pada kesetaraan gender sebagai tema sektornya agar mencakup pemberdayaan perempuan dan anak-anak, tujuan utama dalam pembuatan program ini adalah untuk mengatasi kemiskinan.<sup>38</sup>

AusAID merupakan sebuah program yang berdasarkan kepada *Equality of Opportunity*, yang memiliki arti menyamaratakan akses dan kemajuan layanan publik

---

<sup>36</sup> Wright and Holland, "Leadership and the Media."

<sup>37</sup> Australia appoints global ambassador for women and girls. Retrieved from Australian Department of Foreign Affairs and Trade (2011) <https://www.dfat.gov.au/news/news/Pages/australia-appoints-globalambassador-for-women-and-girls>.

<sup>38</sup> AUSAID. 2011. Promoting opportunities for all: Gender equality and women's empowerment. Canberra: Australian Government.

bagi semua kalangan tidak terbatas oleh gendernya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara adil di mana hal ini juga diberlakukan ke negara yang sering terdampak konflik atau peperangan sehingga banyak anak yang tidak bisa mendapat akses terhadap pendidikan, terutama dalam negara yang memiliki tingkat kesenjangan gender yang tinggi sehingga AusAID memastikan agar anak-anak perempuannya juga dapat memiliki akses terhadap pendidikan dengan beasiswa. Kemudian pada kesempatan yang sama, AusAID juga menjalin kerjasama dengan mitra negara lain untuk membentuk pemerintahan di mana perempuan dapat terlibat secara terbuka dan mampu menjadi agen dalam perdamaian, penyelesaian konflik serta pengambilan keputusan.

Pada masa pemerintahan Julia Gillard menjadi penggebrak perpolitikan Australia dengan mengeluarkan National Action Plan : *Action Plan on Women, Peace, and Security 2012-2018* pada Maret 2012 sebagai bentuk nyata dari Resolusi Dewan PBB 1325 (FaHCSIA, 2012).<sup>39</sup> Julia Gillard pun juga turut menghadiri Forum Kepulauan Pasifik di Kepulauan Cook yang dihadiri oleh berbagai pemimpin di seluruh negara dan saat itu Julia mewakili Australia sebagai pemimpin perempuan pertama yang hadir di forum tersebut sehingga dalam menyuarakan kesetaraan gender, Julia berkomitmen di Forum Kepulauan Pasifik ke-43 untuk meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam parlemen sebagai wujud kepemimpinan yang setara di mata sosial, politik, hukum, dan masyarakat. Hal ini diperjelas dengan pernyataan Julia yang mengatakan bahwa Australia sudah menyiapkan dana dengan nominal \$320 juta selama 10 tahun untuk membantu merealisasikan hal tersebut.<sup>40</sup>

Pilar dari AusAID juga mendukung perihal pemberdayaan ekonomi dan angkatan kerja bagi perempuan di sektor informal maupun formal dengan mengeliminasi hambatan bagi perempuan seperti pendapatan atau upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, serta dipermudahnya perluasan akses layanan teknologi, pasar, dan, finansial terhadap perempuan agar terlepas dari gendernya, negara dapat bersaing secara kompetitif dan dapat bekerja sama dengan sektor publik maupun swasta. Untuk menelaah lebih jauh terhadap komitmen politik dan

---

<sup>39</sup> FaHCSIA. 2012. Australian National Action Plan on Women, Peace and Security 2012–2018. Canberra: Australian Government.

<sup>40</sup> Gillard addresses UN General Assembly. 27 September. Accessed March, 2023 from: . <https://www.abc.net.au/news/2012-09-27/gillard-addresses-ungeneral-assembly/4282652>.

nasionalisme yang ada dalam pemerintahan Julia Gillard, sering kali kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas menuai pertanyaan karena hal tersebut dijalankan oleh sosok pemimpin yang feminis, dan berbeda dengan bagaimana biasanya suatu negara lebih sering menangani konflik dan penyelesaian politik luar negeri dengan cara yang lebih maskulin karena hal tersebut dianggap sebagai ranah laki-laki.<sup>41</sup>

Pendekatan feminis Julia Gillard pun dijabarkan melalui Buku Putih berjudul *Australia in The Asian Century*. Di bawah ke pemerintahannya, Gillard merasa bahwa Australia memiliki banyak peluang dalam menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lainnya di kawasan Asia karena selain keterlibatan ekonomi, Australia memandang bahwa negaranya memiliki sumber daya yang dapat ditawarkan kepada negara-negara Asia lainnya (China, Korea Selatan, Jepang, Indonesia) dan begitu pula sebaliknya, banyak pula kesamaan dan sumber daya yang dapat negara-negara tersebut tawarkan untuk menjalin kerjasama.<sup>42</sup> Sehingga secara lebih luas, pendekatan dalam pemerintahan Gillard lebih mengedepankan hubungan diplomasi daripada penyelesaian konflik yang bersifat menindas atau menimbulkan konflik. Bentuk hubungan ini dibuktikan di tahun 2011, pada saat itu Australia menjalin kesepakatan dengan Malaysia bernama ‘Malaysian Solution’ perihal pengiriman dan pemulangan kembali pengungsi dan pencari suaka antara kedua negara tersebut yang juga didukung oleh United Nations Commissioner For Refugees (UNHCR). Walaupun menuai berbagai kritik dari pimpinan oposisi terkait kebijakannya, Australia berhasil menjadi negara yang aman bagi para pengungsi atau pencari suaka untuk berlabuh selama mereka memenuhi syarat dan proses tertentu di Malaysia.<sup>43</sup>

### ***Implementasi Kesetaraan Gender dalam Partisipasi Politik***

Partisipasi politik merupakan suatu bentuk tindakan yang digambarkan sebagai bentuk keaktifan masyarakat, dalam hal ini adalah perempuan baik dalam praktik politik praktis ataupun bentuk lainnya. Mengacu pada pembahasan dalam Tulisan ini, mengenai hambatan yang ada dalam partisipasi perempuan saat bersaing dalam pemilu,

---

<sup>41</sup> Trimble, “Julia Gillard and the Gender Wars.”

<sup>42</sup> Ken Henry, “Australia in the Asian Century,” *Asia & the Pacific Policy Studies* 3, no. 2 (2016): 132–39, <https://doi.org/10.1002/app5.129>.

<sup>43</sup> Michelle Foster, “The Implications of the Failed Malaysian Solution: The Australian High Court and Refugee Responsibility Sharing at International Law,” *Melb. J. Int’l L.* 13 (2012): 395.

maka melihat pada realita yang ada terlihat banyak ketidaksiapan dan hambatan yang muncul baik dalam diri perempuan itu sendiri, faktor internal eksternal, serta kebijakan yang menyulitkan perempuan untuk bersaing maupun kurangnya kesiapan dari partai politik yang mengusung kader perempuannya.

Kesetaraan gender dalam politik merupakan faktor penting dalam menjalan struktur tatanan pemerintahan. Memastikan bahwa kepemimpinan administrasi publik dan parlemen mencerminkan populasi yang mereka layani termasuk komposisi gender mereka dapat berkontribusi pada keadilan dan daya tanggap lembaga-lembaga ini. Mencapai kesetaraan gender dalam politik membutuhkan lebih dari perempuan dan laki-laki yang memiliki bagian yang sama dari kursi parlemen dan posisi menteri. Hal ini mensyaratkan perempuan dan laki-laki dari semua latar belakang memiliki akses yang sama ke posisi tersebut dan selanjutnya dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan atas dasar kesetaraan. Mencapai hal ini memerlukan penerapan lingkungan kerja yang inklusif, memfasilitasi akses yang setara ke peran kepemimpinan.<sup>44</sup>

Sejalan dengan yang disampaikan Karen Celis dan Sarah Childs dalam partisipasi politik ditentukan oleh representasi yang baik memiliki dimensi yang berbeda: representasi deskriptif menghitung jumlah perwakilan perempuan; substantif melihat tindakan apa yang dilakukan untuk perempuan; pandangan simbolis pada apakah perempuan merasa terwakili atau tidak di dalam dan oleh politik. Terkadang, ada kegagalan untuk menyadari bahwa semua dimensi ini bekerja bersama. Tidaklah cukup hanya menargetkan satu dimensi, misalnya mencoba memasukkan beberapa perempuan lagi ke eselon yang lebih tinggi dari partai politik atau memasukkan beberapa kebijakan yang relevan dalam manifesto.<sup>45</sup>

Dengan kata lain, kesetaraan gender melalui partisipasi perempuan dan laki-laki yang setara dalam politik adalah kondisi penting untuk efektif demokrasi dan pemerintahan yang baik. Selain dari memperkuat dan meningkatkan demokrasi sistem, partisipasi lebih banyak perempuan dalam pengambilan keputusan politik memiliki banyak hal positif efek pada masyarakat yang dapat membantu meningkatkan hidup wanita dan pria. Manfaatnya mencakup lebih banyak masyarakat yang adil dan

---

<sup>44</sup> Utami, "Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan Di Australia."

<sup>45</sup> Karen Celis et al., "Rethinking Women's Substantive Representation," *Representation* 44, no. 2 (July 1, 2008): 99–110, <https://doi.org/10.1080/00344890802079573>.



pemerintahan yang inklusif, standar hidup yang lebih tinggi, perkembangan positif bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dan penurunan korupsi politik.

Sejalan dengan yang dikatakan Karen Celis dan Sarah Childs, fokus pada partisipasi politik ditentukan oleh representasi deskriptif yang menugaskan individu perempuan untuk mereformasi kebijakan dan institusi politik ketika mereka memasuki dunia politik. Itu meminta banyak politisi perempuan dan itu bukan cara yang sistematis untuk mewujudkan politik yang baik bagi perempuan. Ini harus menjadi tanggung jawab institusi kita dan semua aktor – laki-laki dan perempuan – untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi tanggung jawab politik, akuntabilitas, dan daya tanggap sudah ada. Ini adalah defisit demokrasi.<sup>46</sup>

Aturan yang ada perlu dilengkapi dengan aturan lain yang dapat memberikan jaminan agar calon perempuan yang maju dalam kontestasi pemilu dapat meningkatkan keterwakilan perempuan. Dengan aturan baru yang diperbaiki diharapkan munculnya persaingan yang sehat antar tiap calon untuk bersaing dalam pemilu, terkhusus perempuan. Salah cara yang dinilai strategis adalah dengan mendukung peranan partai politik dalam proses pencarian kader, pelaksanaan pendidikan politik bagi para kader perempuan dengan serius, terprogram dan terstruktur. Selain itu, dibutuhkan peran pemerintah untuk membentuk landasan hukum baru dalam aturan pemilu. Tugas utama yang terakhir juga tentu saja pendidikan politik bagi masyarakat secara umum untuk merubah stigma perempuan sebagai kelas kedua setelah laki-laki yang tertanam salah di masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Berlandaskan pemaparan di atas, mampu dibuatkan kesimpulan bahwa terpilihnya Julia Gillard merupakan sebuah wujud formal representasi perempuan dalam lembaga pemerintahan Australia. Dengan kehadiran Gillard ke tahta tertinggi pemerintahan Australia menjadi sebuah momentum kaum perempuan di lembaga politik Australia untuk ikut terlibat dalam perpolitikan negara. Alur pemerintahan Julia Gillard sendiri tidak jauh dari pandangan dan teori feminisme liberal yang melibatkan

---

<sup>46</sup> Karen Celis and Sarah Childs, "The Substantive Representation of Women: What to Do with Conservative Claims?," *Political Studies* 60, no. 1 (March 1, 2012): 213–25, <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x>.

komitmen politik dalam kesetaraan gender. Hal ini dilihat dari pergerakan Julia dalam menangani negara melalui reformasi hukum dan kebijakan, seperti pembentukan duta internasional untuk perempuan dan anak-anak dan pembentukan program bantuan dengan tujuan mengatasi kemiskinan bernama *Australian AID* (AusAID) yang berorientasi pada kesetaraan gender sebagai tema sektornya agar mencangkup pemberdayaan perempuan dan anak-anak, hal ini tentunya membawa perubahan nyata karena strategi pertama dalam program AusAID.

## REFERENSI

- Allman, Kate. "Profile: Exclusive: Phoenix Rising: Julia Gillard on Life after Politics." *LSJ: Law Society Journal*, no. 62 (November 9, 2020): 40–43. <https://doi.org/10.3316/informit.818999323033848>.
- Anam, Wahidul, and Mubaidi Sulaeman. "Reinterprestasi Hadis Mesoginik Kepemimpinan Wanita Dalam Musnad Ahmad Perspektif Maqasid Al-Shariah." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 3 (December 28, 2022). <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i3.5172>.
- Australia, Pemerintah, U. N. Women, and Ryan Brown Flickr. "Developmental Leadership," 2022.
- Boxer, Diana. "Discourse, Politics and Women as Global Leaders," 2015, 1–366.
- Celis, Karen, and Sarah Childs. "The Substantive Representation of Women: What to Do with Conservative Claims?" *Political Studies* 60, no. 1 (March 1, 2012): 213–25. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2011.00904.x>.
- Celis, Karen, Sarah Childs, Johanna Kantola, and Mona Lena Krook. "Rethinking Women's Substantive Representation." *Representation* 44, no. 2 (July 1, 2008): 99–110. <https://doi.org/10.1080/00344890802079573>.
- Curtin, Jennifer. "The Prime Ministership of Julia Gillard." *Australian Journal of Political Science* 50, no. 1 (January 2, 2015): 190–204. <https://doi.org/10.1080/10361146.2015.1010481>.
- Donaghue, Ngairé. "Who Gets Played By 'The Gender Card?'" *Australian Feminist Studies* 30, no. 84 (April 3, 2015): 161–78. <https://doi.org/10.1080/08164649.2015.1038118>.
- Eidenfalk, Joakim, Vivien W. Forner, Michael Jones, and Dominique Rene Parrish. "Prime Ministers as Leaders: Applying Self-Determination Theory on Australian Prime Ministers." *Journal of Social and Political Psychology* 6, no. 1 (June 26, 2018): 224–41. <https://doi.org/10.5964/jsp.p.v6i1.763>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Farrelly, Penny. "Choosing the Right Method for a Qualitative Study." *British Journal of School Nursing* 8, no. 2 (March 2013): 93–95. <https://doi.org/10.12968/bjsn.2013.8.2.93>.
- Fiskurniawati, Dian. "Representasi Kebijakan Australia Labor Party Dalam Kuota Parlemen Perempuan Australia Pada Masa Julia Gillard (2010-2019)," 2020.

- Foster, Michelle. "The Implications of the Failed Malaysian Solution: The Australian High Court and Refugee Responsibility Sharing at International Law." *Melb. J. Int'l L.* 13 (2012): 395.
- Gillard, Julia, and Ngozi Okonjo-Iweala. *Women and Leadership: Real Lives, Real Lessons*. MIT Press, 2022.
- Gustina, Sukmawaty Arisa. *Hak Politik Perempuan Di Parlemen: Perspektif Hukum Yang Berkeadilan*. Feniks Muda Sejahtera, 2022.
- Henry, Ken. "Australia in the Asian Century." *Asia & the Pacific Policy Studies* 3, no. 2 (2016): 132–39. <https://doi.org/10.1002/app5.129>.
- Hevriansyah, Andie. "Hak Politik Keterwakilan Perempuan Dalam Sistem Proporsional Representatif Pada Pemilu Legislatif." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 1, no. 1 (June 9, 2021): 67–85.
- Hilmawan, Hilal. "Implementasi Sistem Pemilu Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Negara Indonesia Dan Australia." *ASPIRASI* 9, no. 2 (February 20, 2019): 104–11.
- Johnson, Carol. "Playing the Gender Card: The Uses and Abuses of Gender in Australian Politics." *Politics & Gender* 11, no. 2 (June 2015): 291–319. <https://doi.org/10.1017/S1743923X15000045>.
- Lengermann, Patricia M., and Jill Niebrugge. "Intersubjectivity and Domination: A Feminist Investigation of the Sociology of Alfred Schutz." *Sociological Theory*, 1995, 25–36.
- McAllister, Ian. "The Gender Gap in Political Knowledge Revisited: Australia's Julia Gillard as a Natural Experiment." *European Journal of Politics and Gender* 2, no. 2 (June 1, 2019): 197–220. <https://doi.org/10.1332/251510818X15272520831148>.
- McCann, Joy, and Janet M. Wilson. "Representation of Women in Australian Parliaments 2014," 2012. <https://www.semanticscholar.org/paper/Representation-of-women-in-Australian-parliaments-McCann-Wilson/268669341dfd4172932cd9872932752782812c1e>.
- Mudaris, Hudan. "Diskursus Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam; Menuju Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Yang Adil Dan Setara." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009): 234–48.
- O'Flaherty, Veronica Ann. "A Very Dim Light, a Very Steep Hill: Women in the Victorian Branch of the Australian Labor Party." Phd, Victoria University, 2005. <http://vuir.vu.edu.au/>.
- PUSAT RISET POLITIK. "Dibalik Terpilihnya Julia Gillard Sebagai PM Australia: Analisis Gender," June 28, 2010. <https://politik.brin.go.id/kolom/etnisitas-gender-agama/dibalik-terpilihnya-julia-gillard-sebagai-pm-australia-analisis-gender/>.
- Roald, Anne Sofie. "Feminist Reinterpretation of Islamic Sources: Muslim Feminist Theology in the Light of the Christian Tradition of Feminist Thought." In *Women and Islamization*. Routledge, 1998.
- Sulaeman, Mubaidi. "Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam." *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 4, no. 2 (2018): 104–30.

- Taniady, Vicko, Brillian Aditya Prawira Arafat, and Hari Sutra Disemadi. "Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 19, no. 2 (December 29, 2020): 1055–64. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1139>.
- Tridewiyanti, Kunthi. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik 'Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif.'" *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73–90.
- Trimble, Linda. "Julia Gillard and the Gender Wars." *Politics & Gender* 12, no. 2 (June 2016): 296–316. <https://doi.org/10.1017/S1743923X16000155>.
- . *Ms. Prime Minister: Gender, Media, and Leadership*. University of Toronto Press, 2018.
- Utami, Utari Diyarza. "Kompleksitas Kepemimpinan Perempuan Di Australia." *Jurnal PIR: Power in International Relations* 4, no. 2 (2020): 101–14.
- Williams, Blair. "It's a Man's World at the Top: Gendered Media Representations of Julia Gillard and Helen Clark." *Feminist Media Studies* 22, no. 4 (May 19, 2022): 780–99. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1842482>.
- Worth, Anna, Martha Augoustinos, and Brianne Hastie. "'Playing the Gender Card': Media Representations of Julia Gillard's Sexism and Misogyny Speech." *Feminism & Psychology* 26, no. 1 (February 1, 2016): 52–72. <https://doi.org/10.1177/0959353515605544>.
- Wright, Katharine A.M., and Jack Holland. "Leadership and the Media: Gendered Framings of Julia Gillard's 'Sexism and Misogyny' Speech." *Australian Journal of Political Science* 49, no. 3 (July 3, 2014): 455–68. <https://doi.org/10.1080/10361146.2014.929089>.
- Yaufi, Muhammad, and Muhammad Yaufi. "Reinterpretation Meaning of Qiwama in Surah An-Nisa'verse 34 Perspective Hermeneutics of Khaled M. Abou El-Fadl." *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial* 1, no. 01 (December 5, 2022): 193–209.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).